



PERAN JURNALIS DALAM MENJAGA NKRI MELALUI PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DI KOTA PEKAN BARU

Dedi Fransisko S¹, Inessthasia M. Ijfi², Sakhila Ramadanadiva Arvi³, Edo Arribe⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau

Alamat Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, 28292

Email: 230402030@student.umri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran strategis jurnalis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pemberitaan kasus korupsi di Kota Pekanbaru. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan jurnalis lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis berperan vital sebagai agen kontrol sosial, edukator publik, dan pendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Meskipun menghadapi tantangan seperti tekanan politik, keterbatasan akses informasi, dan risiko keselamatan, jurnalis investigatif terbukti mampu mengungkap praktik korupsi yang tersembunyi dan mendorong tindakan korektif aparat penegak hukum. Temuan ini menegaskan posisi jurnalis sebagai garda terdepan dalam memerangi korupsi dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, dukungan terhadap kebebasan pers dan perlindungan jurnalis dalam menjalankan tugas profesionalnya di tingkat lokal sangat krusial.

Kata Kunci: jurnalis investigatif, korupsi, media lokal, NKRI.

Abstrak

This study analyzes the strategic role of journalists in maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) through reporting on corruption cases in Pekanbaru City. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained through in-depth interviews with local journalists. The results of the study indicate that journalists play a vital role as agents of social control, public educators, and drivers of government transparency and accountability. Despite facing challenges such as political pressure, limited access to information, and safety risks, investigative journalists have proven capable of uncovering hidden corruption practices and encouraging corrective action by law enforcement officers. These findings emphasize the position of journalists as the vanguard in combating corruption and maintaining democratic values. Therefore, support for press freedom and protection of journalists in carrying out their professional duties at the local level is crucial.

Kata Kunci: Investigative journalist, corruption, local media, NKRI

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi modern, pers memainkan peran penting sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, pers berfungsi sebagai kontrol sosial yang menjamin akuntabilitas kekuasaan serta menjadi ruang dialektika publik antara negara dan warga (Ritonga et al., 2023; Wyne et al., 2024) Namun demikian, dalam praktiknya, peran strategis ini tidak bebas dari tantangan, terutama ketika menyangkut isu-isu krusial seperti korupsi.

Korupsi merupakan persoalan struktural yang telah lama melemahkan fondasi negara, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga merusak moralitas institusi, memperlebar ketimpangan sosial, dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah (Danardono,



2024; Nadhiroh et al., 2024) Pemberitaan mengenai korupsi oleh jurnalis bukan sekadar aktivitas jurnalistik biasa, melainkan bagian dari upaya membongkar struktur kekuasaan yang korup serta membentuk opini publik yang kritis. Berdasarkan Corruption Perception Index (2023), Indonesia menempati peringkat ke-34 dari 100 negara dengan eksposur tinggi terhadap pemberitaan korupsi, memperlihatkan urgensi dan keparahan persoalan ini. Artinya, media bukan hanya pelapor, tetapi aktor aktif dalam proses advokasi keadilan dan reformasi (Syahputra & Yudhistira, 2023).

Dalam mengkaji peran jurnalis dalam pemberitaan kasus korupsi, pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori framing oleh Robert M. Entman. Menurut (Gilang Desti Parahita, 2014) teori framing adalah proses menonjolkan bagian informasi tertentu agar terlihat lebih bermakna dan mudah diingat oleh audiens. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa informasi tersebut dipahami, ditangkap maknanya, dan disimpan dalam memori publik. Penggunaan teori ini sangat penting karena membantu memahami bukan hanya apa yang diberitakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa isu tersebut diberitakan dengan cara tertentu.

Fungsi media massa dalam membongkar praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menjadi bentuk aktualisasi dari peran pers sebagai alat demokrasi substantif. Jurnalis memiliki peran ganda: mengungkap fakta tersembunyi yang kerap ditutupi oleh kepentingan kekuasaan, sekaligus memobilisasi opini dan partisipasi publik dalam mendorong akuntabilitas (H & M, 2025; Ritonga et al., 2023) . Dalam konteks kebangsaan, pemberitaan korupsi menjadi benteng pertahanan non-militer dalam menjaga keutuhan dan integritas NKRI. Korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi ancaman terhadap kedaulatan negara (Danardono, 2024) . Ketika praktik korupsi terjadi secara sistemik, yang dipertaruhkan adalah kredibilitas negara di mata rakyat maupun di internasional.

Menimbang urgensi tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (Wyne et al., 2024) , Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara komprehensif tindak pidana, mekanisme penindakan, hingga pelibatan masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk media. Dua regulasi ini menjadi landasan hukum yang memayungi kerja jurnalis dalam membongkar praktik korupsi dan mendorong perubahan sistemik.

Secara lokal, Provinsi Riau menjadi studi kasus penting mengingat tingginya kasus korupsi yang terjadi. Meski tidak sepopuler Jakarta dalam pemberitaan nasional, Riau menyumbang



deretan kasus korupsi yang signifikan. Salah satu kasus yang mencuat adalah korupsi proyek pembangunan fly over Simpang Jalan Tuanku Tambusai dan Jalan Soekarno Hatta pada anggaran tahun 2018. Kasus ini melibatkan lima tersangka dari berbagai institusi mulai dari Dinas PUPR hingga pihak swasta, dan menjadi sorotan media lokal serta nasional (Undang-Undang Republik Indonesia, n.d.).

Pemberitaan luas terhadap kasus tersebut menunjukkan bahwa jurnalis di Riau memiliki peran strategis dalam membuka mata publik dan menekan lembaga penegak hukum untuk bertindak. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa dalam praktiknya, jurnalis menghadapi tantangan yang kompleks. Pembatasan akses informasi, intervensi politik, hingga rendahnya kapasitas profesionalisme menjadi faktor yang menghambat kualitas pemberitaan. Kesenjangan antara idealisme jurnalistik dan realitas kerja di lapangan seringkali menciptakan dilema etis serta risiko keamanan bagi jurnalis (Syahputra & Yudhistira, 2023; Wyne et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana peran jurnalis tidak hanya dalam memberitakan, tetapi juga menjaga NKRI dari ancaman sistemik korupsi.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemberitaan media memiliki korelasi dengan meningkatnya kesadaran publik dan tekanan terhadap penegakan hukum. Misalnya, studi oleh (H & M, 2025) menekankan pentingnya kualitas pemberitaan dalam membentuk opini masyarakat dan mendorong proses hukum (Nadhiroh et al., 2024). Namun, penelitian ini mencoba untuk melangkah lebih jauh dengan menempatkan jurnalis sebagai aktor kebangsaan yang terlibat langsung dalam menjaga keutuhan NKRI melalui praktik jurnalistik yang berani, profesional, dan bertanggung jawab. Fokus penelitian diarahkan pada konteks Provinsi Riau untuk menggambarkan dinamika lokal dalam kerangka kebangsaan yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat peran pers sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi dan penjaga demokrasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam peran jurnalis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pemberitaan kasus korupsi di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara holistik, serta menggali makna di balik tindakan dan pengalaman jurnalis dalam konteks peliputan isu korupsi.



Subjek penelitian adalah jurnalis lokal di Kota Pekanbaru yang aktif dalam peliputan kasus korupsi, baik dari media daring, maupun media sosial. Sementara itu, objek penelitian adalah praktik pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh jurnalis dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, terutama melalui fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada publik. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan april hingga Mei 2025, yang mencakup tahap pengumpulan data dan penyusunan artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur kepada sejumlah jurnalis lokal yang aktif meliput isu korupsi di wilayah Pekanbaru. Pendekatan semi-terstruktur memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengeksplorasi informasi baru di luar panduan wawancara yang telah disiapkan. Wawancara merupakan teknik penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memahami pengalaman subjek secara langsung dalam konteks sosialnya.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yakni proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang relevan; (2) penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi dalam bentuk narasi tematik agar memudahkan pemahaman konteks; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi terhadap pola, makna, dan temuan utama untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Ketiga proses ini bersifat siklus dan saling berinteraksi, sehingga pengumpulan data dan analisis berjalan simultan dan tidak terpisah satu sama lain (Ahmad Rijali, 2018).

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari beberapa narasumber berbeda, serta member check, yakni mengkonfirmasi temuan kepada informan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memastikan keabsahan informasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Media dan Implikasinya terhadap Pemberitaan Korupsi

Transformasi media di era digital membawa dampak besar terhadap fungsi media dalam demokrasi, khususnya sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Sebagai pilar keempat demokrasi, media bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai hukum dan kepentingan rakyat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers berperan sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol social (Macmud, 2013). Dalam konteks



pemberantasan korupsi, media diharapkan menjadi penekan moral dan politik terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, media mengalami perubahan signifikan, mulai dari struktur kepemilikan, model bisnis, hingga pola pemberitaan. Banyak media kini dikuasai oleh kelompok dengan keterikatan politik atau ekonomi tertentu, sehingga independensi redaksi menurun. Hal ini menyebabkan pemberitaan korupsi yang melibatkan elite sering kali dibatasi, atau bahkan tidak muncul sama sekali (Raifangga et al., 2025).

Tekanan terhadap jurnalis investigatif juga semakin meningkat. Wartawan yang berani membongkar kasus korupsi sering menghadapi intimidasi, kekerasan, bahkan kriminalisasi, menandakan bahwa kebebasan pers belum sepenuhnya terlindungi (Rahmawati et al., 2024). Jurnalis A merupakan jurnalis investigatif dari sebuah media lokal yang ada di kota Pekanbaru, menyatakan bahwa “banyak wartawan di lapangan menghadapi tekanan serius saat mengungkap kasus korupsi, terutama yang melibatkan tokoh berpengaruh. Tak jarang, peliputan terpaksa dihentikan demi keselamatan pribadi.” Padahal, jurnalis investigatif sangat penting untuk mengungkap praktik korupsi yang tertutup dari publik .

Masalah internal di media turut memperburuk situasi. Munculnya oknum jurnalis gadungan yang memanfaatkan isu korupsi untuk memeras narasumber telah merusak citra profesi kewartawanan dan memperlemah kepercayaan publik (Kurniati et al., 2025) Sementara itu, tekanan pasar dan persaingan di era digital membuat banyak media lebih fokus pada konten viral dan ringan demi klik dan rating, ketimbang meliput isu-isu penting seperti korupsi yang memerlukan riset dan pendanaan lebih.

Akibatnya, pemberitaan korupsi mengalami penurunan kualitas dan kuantitas, yang berdampak pada melemahnya kesadaran publik terhadap pentingnya pemberantasan korupsi (Raifangga et al., 2025). Meski tidak memiliki wewenang hukum, media tetap berperan besar dalam membentuk opini publik, menekan pemerintah untuk bertindak, serta memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas (Macmud, 2013).

Namun, saat media kehilangan independensi atau menjadi perpanjangan tangan kepentingan elite, publik kehilangan akses terhadap informasi yang objektif dan akurat. Ini akan mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan menciptakan iklim yang rawan terhadap praktik korupsi (Rahmawati et al., 2024).

Dengan demikian, transformasi media yang ditandai oleh digitalisasi, komersialisasi, dan kepemilikan terpusat telah mengurangi peran media dalam pemberantasan korupsi. Jika media



lebih mementingkan pasar dan politik dibanding idealisme jurnalistik, maka fungsi kontrol sosial akan melemah. Oleh karena itu, menjaga kejujuran, keberanian, dan sikap profesional media sangat penting agar isu korupsi terus menjadi perhatian masyarakat dan demokrasi bisa berjalan dengan baik.

Tantangan Etis dan Profesional Jurnalis dalam Meliput Kasus Korupsi

Meliput kasus korupsi merupakan salah satu tugas terberat yang diemban oleh jurnalis. Tanggung jawab ini tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga integritas dalam menyampaikan kebenaran kepada publik. Dalam praktiknya, jurnalis kerap berada dalam posisi dilematis antara idealisme profesi dan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, terutama mereka yang memiliki kuasa.

Salah satu tantangan utama yang sering muncul di lapangan adalah intimidasi dan ancaman terhadap jurnalis. Dalam jurnal (Raj Ravicky Fardenias & Frans Simangunsong, 2024), dijelaskan bahwa tekanan dari elite politik dan pelaku korupsi sering kali menghambat proses peliputan. Ancaman yang diterima jurnalis dapat berupa intimidasi fisik, tekanan hukum, hingga gangguan psikologis. Situasi ini menandakan bahwa ruang gerak jurnalis masih belum sepenuhnya aman, terutama dalam konteks pemberitaan kasus korupsi.

Pengalaman serupa turut dibuktikan oleh jurnalis local, jurnalis tersebut dari salah satu media lokal di Pekanbaru, yang mengaku pernah mengalami hambatan dan tekanan saat meliput kasus dugaan korupsi pejabat daerah. Tekanan tersebut bervariasi, mulai dari pesan intimidatif hingga kesulitan memperoleh akses informasi. Meskipun tidak selalu berujung pada kekerasan fisik, kondisi ini mengganggu independensi dan efektivitas kerja jurnalis.

Selain tekanan eksternal, jurnalis juga dihadapkan pada tantangan etis dalam menjaga independensi dan objektivitas. Dalam jurnal (Caroline, 2018) disebutkan bahwa media online kerap memunculkan framing tertentu sesuai dengan kepentingan pemilik atau tekanan komersial, sehingga mengaburkan inti persoalan korupsi itu sendiri.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan akses informasi publik. Dalam jurnal (SAL & Isnawati, 2021) diuraikan bahwa birokrasi tertutup dan tidak transparan sering kali menjadi hambatan utama bagi jurnalis investigatif. Banyak instansi menolak memberikan data atau tanggapan resmi, membuat jurnalis bekerja lebih keras untuk mendapatkan informasi akurat.

Persoalan lainnya adalah soal integritas jurnalis itu sendiri. Dalam jurnal (Musfialdy, 2019), ditegaskan bahwa meski media massa berperan sebagai pengawas publik, masih banyak



jurnalis yang berpihak karena gratifikasi atau tekanan tertentu, sehingga merusak profesionalisme dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media.

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, sangat penting bagi jurnalis untuk tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam peliputan kasus korupsi. Dukungan dari media tempat mereka bekerja, perlindungan hukum yang memadai, serta keterlibatan organisasi profesi dan masyarakat sipil menjadi faktor penting untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga dalam mengungkap kebenaran.

Media sebagai Instrumen Penjaga Transparansi dan Integritas Negara

Media memiliki peran sentral dalam menjaga transparansi dan integritas negara, terutama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Keberadaan media tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai pengawas sosial yang berfungsi mengungkap praktik penyimpangan dalam birokrasi, legislatif, maupun eksekutif. Melalui kerja-kerja investigatif, media mampu menembus batas kekuasaan dan menghadirkan fakta-fakta kepada publik yang seringkali tertutup oleh kepentingan elite politik dan kekuasaan.

Jurnalis lokal yang bekerja di media lokal menunjukkan bagaimana media di daerah mampu menjalankan fungsi kontrolnya secara aktif. Dengan turun langsung ke lapangan, mereka menggali data, memverifikasi informasi, dan menyajikan pemberitaan yang faktual kepada masyarakat. Dalam praktiknya, jurnalis tidak hanya melaporkan kejadian, tetapi juga membangun narasi kritis yang dapat mengarahkan perhatian publik pada permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Temuan (Raifangga et al., 2025) dalam Jurnal Penelitian Inovatif menegaskan bahwa media sebagai watchdog memiliki peran penting dalam membuka ruang pelaporan, memberi tekanan publik terhadap korupsi, dan memperkuat sinergi antara media, masyarakat, dan kebijakan antikorupsi.

Namun, dalam menjalankan peran tersebut, media tidak jarang menghadapi berbagai bentuk tekanan. Intimidasi terhadap jurnalis, baik secara personal maupun terhadap institusi medianya, menjadi tantangan serius dalam menegakkan kebebasan pers. Meski dilindungi oleh undang-undang dan lembaga seperti Dewan Pers, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kerja-kerja jurnalistik masih rentan terhadap intervensi, terutama ketika menyentuh isu-isu sensitif yang melibatkan kekuasaan atau kepentingan politik.

Meskipun demikian, keberanian media dalam mengangkat isu-isu ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang menjadi faktor penting dalam mendidik masyarakat. Melalui pemberitaan yang konsisten, publik memperoleh kesadaran bahwa pengawasan terhadap



pemerintah bukan hanya tugas lembaga formal, tetapi juga merupakan bagian dari peran media. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Rosidah, 2023), yang menyimpulkan bahwa lemahnya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintahan dapat memicu meningkatnya risiko fraud. Oleh karena itu, media yang bebas dan profesional menjadi komponen penting dalam mengawal pengelolaan sumber daya publik secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam konteks yang lebih luas, media merupakan bagian dari sistem checks and balances dalam demokrasi. Ketika media berfungsi secara independen dan profesional, maka jalannya pemerintahan akan lebih terbuka dan jujur. Sebaliknya, ketika media dikendalikan atau memilih bungkam karena tekanan ekonomi dan politik, maka transparansi negara terancam. Oleh karena itu, menjaga ruang kebebasan pers dan memperkuat kapasitas jurnalis menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kontribusi Jurnalis Dalam Menyuarakan Kasus Korupsi sebagai Upaya Menumbuhkan Kesadaran Publik

Jurnalis lokal memiliki peranan penting dalam membentuk opini publik dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Melalui peliputan yang konsisten, tajam, dan berbasis fakta, jurnalis menjadi aktor utama dalam menyuarakan ketidakberesan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga moral publik, yang bertugas memastikan setiap praktik penyimpangan kekuasaan diketahui oleh masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, studi oleh (Gobang, 2016) menunjukkan bahwa media lokal seperti Flores Pos dan Pos Kupang secara tegas menunjukkan sikap antikorupsi melalui tajuk editorial mereka. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa media lokal mampu mengambil sikap kritis terhadap kekuasaan sekaligus mendorong pembentukan opini masyarakat di daerah rawan korupsi.

Kontribusi utama jurnalis dalam mengangkat isu korupsi terletak pada kemampuannya membongkar fakta-fakta tersembunyi yang tidak terungkap oleh institusi resmi. Dengan terjun langsung ke lapangan, jurnalis lokal mampu memperoleh data otentik dan narasi dari masyarakat yang menjadi korban atau saksi. Proses ini tidak hanya memperkuat validitas berita, tetapi juga meningkatkan keterlibatan publik dalam memahami dan merespons isu-isu korupsi yang sebelumnya mungkin dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat dalam jurnal yang ditulis oleh (Kurniati et al., 2025) yang menekankan bahwa media massa memainkan peran vital dalam membongkar praktik pungli secara investigatif dan menyuarakan tekanan moral pada pemerintah agar bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.



Pemberitaan tentang korupsi yang dilakukan oleh media lokal juga berfungsi sebagai sarana edukatif yang membentuk kesadaran kolektif. Masyarakat mulai menyadari bahwa praktik korupsi tidak selalu berlangsung di tingkat nasional atau dalam skala besar, melainkan juga menyusup hingga ke lingkup pemerintahan daerah. Dengan menyajikan berita yang faktual dan berimbang, jurnalis membantu membuka mata publik bahwa korupsi adalah ancaman nyata yang dapat mempengaruhi kualitas layanan publik dan keadilan sosial. Proses ini menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara yang berdaulat atas informasi dan pelayanan publik yang bersih.

Namun, di balik kontribusi besar tersebut, jurnalis kerap menghadapi tantangan serius dalam menjalankan tugasnya. Ancaman, intimidasi, hingga tekanan politik menjadi bagian dari risiko yang harus dihadapi saat mengangkat isu-isu sensitif seperti korupsi. Dalam kondisi ini, perlindungan terhadap jurnalis menjadi sangat penting agar independensi pers tetap terjaga dan mereka dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa rasa takut atau intervensi. Peran serta dari lembaga advokasi dan kebijakan publik juga dibutuhkan agar ruang kebebasan pers tidak hanya dijamin secara hukum, tetapi juga dilindungi secara praktik di lapangan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa jurnalis memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui praktik pemberitaan kasus korupsi, khususnya di tingkat lokal seperti Kota Pekanbaru. Jurnalis tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mengedukasi publik, mendorong transparansi, dan mengawasi kekuasaan. Dalam konteks ini, mereka turut serta menjaga nilai-nilai demokrasi dengan membongkar praktik korupsi yang tersembunyi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akuntabilitas pemerintahan. Meskipun menghadapi tantangan berupa tekanan politik, keterbatasan akses informasi, serta ancaman keselamatan, jurnalis investigatif mampu menunjukkan keberanian dan profesionalisme dalam mengemban tugas mereka. Dengan demikian, peran jurnalis bukan hanya sebatas peliput berita, melainkan sebagai garda terdepan dalam membangun integritas bangsa dan melindungi NKRI dari bahaya sistemik korupsi. Berdasarkan hasil temuan tersebut, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis, khususnya mereka yang terlibat dalam peliputan kasus korupsi. Media massa juga



perlu meningkatkan kualitas pemberitaan dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan menjaga independensi redaksional. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara media, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada pengaruh langsung pemberitaan media terhadap perubahan kebijakan publik di tingkat daerah sebagai bentuk penguatan peran pers dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan rasa syukur kami panjatkan puji dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kemudahan, sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan jurnal ini merupakan bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah Kewarganegaraan pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau.

Kami menyadari bahwa penyelesaian karya tulis ilmiah ini tidak akan tercapai tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Risky Ramadhan Rangkuti (220402021), M. Afif Rafinaldi (230402033) atas komitmen waktu, tenaga, dan pemikiran yang sangat berharga dalam proses penyusunan riset serta penyelesaian penelitian ini. Keberhasilan jurnal ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dan kerja sama dari mereka.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa/i Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan jurnal ini berlangsung. Kami menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas jurnal ini di masa yang akan datang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Issue 33).
- Caroline, R. (2018). Trial By The Press: Peran Media Massa Dalam Kasus Korupsi Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah. *Jurnal Kertha Desa*, 13, 142–152. <https://doi.org/10.31602/AI-Adl.V9i3.1047>



- Danardono. (2024). Dampak Negatif Tindak Pidana Korupsi Dalam Terwujudnya Stabilitas Nasional. *Maleo Law Journal*, 8(1), 50–64.
- Gilang Desti Parahita. (2014). *Teori Framing*. [Http://Www.Robertentman.Com](http://www.Robertentman.Com),
- Gobang. (2016). Media Massa Lokal Di Daerah Rawan Korupsi: Studi Kritis Terhadap Sikap Antikorupsi Media Massa Cetak Lokal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Article Sidebar. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2, 155–173.
- H, A., & M, A. L. (2025). Peran Media Massa Dalam Pemberitaan: Kasus Korupsi Di Kalimantan Selatan. *Journal Of Syntax Literate*, 10(3), 2519–2529.
- Kurniati, P., Nursyamsiah, S., & Barokah, A. (2025). Peran Strategis Media Massa Dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pendidikan Antikorupsi Dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 62–69.
- Macmud, A. (2013). Determinasi Media Dalam Mengawal Dan Mendorong Penegakan Hukum Melawan Korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 139–144.
- Musfialdy. (2019). Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas Dan Netralitas Pemberitaan Media. *Jurnal Riset Komunikasi*, 2(1), 21–28.
- Nadhiroh, Azkia, M., & Dwi Wahyuni, R. (2024). Pesan-Pesan Anti Korupsi Dalam Berita Republika.Co.Id Untuk Meningkatkan Peran Media Islam. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(2), 156–177. <https://doi.org/10.58326/Jurnallisyabab.V5i2.321>
- Rahmawati, M., Arya Sari, F., Melani, E., Adila, F., & Fildza Shabrina, N. (2024). Peranan Media Massa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5, 1–10. <https://doi.org/10.3783/Causa.V2i9.2461>
- Raifangga, M. C., Husnayain, N., Rahmatussalimah, R., Hasibuan, S. C., Masyropah, S., Sarah, S., & Latifah, A. (2025). Peran Media Dan Partisipasi Publik Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik Terhadap Praktik Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 529–538. <https://doi.org/10.54082/Jupin.1231>
- Raj Ravicky Fardenias, & Frans Simangunsong. (2024). Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Indonesia Dalam Kasus Korupsi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 222–231. <https://doi.org/10.62383/Progres.V1i3.542>
- Ritonga, K., Reindra, K., E. E., Hasniyah Nasution, M., Purba, U. H., & Fazri Az-Zahra, S. (2023). Peran Pers Dalam Membangun Negara Dan Daerah. *Journal Of Social Science Research*, 3, 8156–8170.
- Rosidah, I. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2, 137–156.
- Sal, L., & Isnawati, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan. *Jurnal Justiciabelen*, 4, 50–63.
- Syahputra, W. A., & Yudhistira, M. H. (2023). Pengaruh Operasi Tangkap Tangan (Ott) Terhadap Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Masyarakat (Studi Kasus Kpk). *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(1), 64–80. <https://doi.org/10.21002/Jke.2023.05>
- Undang Undang Republik Indonesia*. (N.D.).
- Wyne, Filan, & Asyah. (2024). Analisis Yuridis Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Demonstrasi. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 339–346.